

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) WISATA EDUKASI TALANGAGUNG**

(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

ELLY IRA RAYANI

NPM 21901091018



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2025

RINGKASAN

Elly Ira Rayani, 2025 NPM 21901091018, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang), Dosen Pembimbing I: Suyeno S.Sos., M. AP, Dosen Pembimbing II: Langgeng rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

Salah satu masalah kompleks yang menjadi isu hangat untuk diperbincangkan pada hampir seluruh wilayah perkotaan maupun daerah-daerah kecil di Indonesia adalah sampah. Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia. Hal ini timbul data sampah nasional disebabkan karena banyaknya hal yang mempengaruhi diantaranya yaitu penduduk banyak mengkonsumsi makanan dan menghasilkan sampah yang banyak

Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan sampah yang ada di TPA Wisata Edukasi Talangagung. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talangagung (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Malang). Apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talangagung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Model yang dipakai pada penelitian ini adalah model Miles, Huberman dan Saldana (2014:16) meliputi tahapan penyusunan data secara terstruktur, pengelompokkan ke dalam pola-pola tertentu, kategori, dan unit-unit deskripsi dasar

Hasil dari penelitian menunjukkan pengelolaan sampah yang ada di TPA Wisata Edukasi Talangagung dikatakan kurang efektif. Dari hasil analisis bahwa pengelolaan sampah tersebut sudah berjalan cukup baik dan anggaran yang digunakan cukup besar namun belum bisa mengatasi permasalahan. Kecukupan pengelolaan sampah belum menunjukkan bahwa karena masih kurangnya TPS dalam hal pengelolaan perataan sampah yang ada di TPA Wisata Edukasi Talangagung sudah mencapai 80% dengan membuat gas dan dibagikan ke warga setempat. Dan responsivitas terhadap pengelolaan sampah mendapat respon sangat positif dari warga setempat karena sangat berguna untuk keluarga yang miskin. Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan sampah yaitu adanya koordinasi rutin, adanya sumber daya unggul, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi dari masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Wisata Edukasi Talangagung minimnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan serta kurangnya TPS yang ada

Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Program, Pengelolaan Sampah.

SUMMARY

Elly Ira Rayani, 2025 NPM 21901091018, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, University of Islam Malang, Evaluation of Final Disposal Waste Management Policy (TPA) Talangagung Educational Tourism (Malang Regency Environmental Service Study), Supervisor I: Suyeno S.Sos., M. AP, Supervisor II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

One of the complex problems that has become a hot issue to discuss in almost all urban areas and small regions in Indonesia is waste. Waste management is still the biggest challenge for Indonesia. This national waste data is caused by many things that affect it, including the population consuming a lot of food and producing a lot of waste.

The aim of this research is to describe and evaluate how waste management is in the Talangagung Educational Tourism Landfill. How is the Evaluation of the Waste Management Policy of the Talangagung Educational Tourism Landfill (Study of the Malang Regency Environmental Service). What are the Supporting Factors and Obstacles in Waste Management of the Talangagung Educational Tourism Landfill.

In this research, the research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The model used in this research is the Miles, Huberman and Saldana model (2014: 16) which includes structured data preparation stages, grouping into certain patterns, categories, and basic description units.

The results of the research show that waste management in the Talangagung Educational Tourism Landfill is said to be less effective. From the results of the analysis that waste management has been running quite well and the budget used is quite large but has not been able to overcome the problem. The adequacy of waste management has not shown that due to the lack of TPS in terms of waste leveling management in the Talangagung Educational Tourism Landfill has reached 80% by making gas and distributing it to local residents. And responsiveness to waste management gets a very positive response from local residents because it is very useful for poor families. Supporting factors in waste management are routine coordination, superior resources, adequate facilities and infrastructure, and community participation. The inhibiting factors in the implementation of waste management at the Talangagung Educational Tourism Landfill are the lack of public awareness in terms of environmental cleanliness and the lack of existing TPS.

Keywords: Policy Evaluation, Program, Waste Management.

BAB I

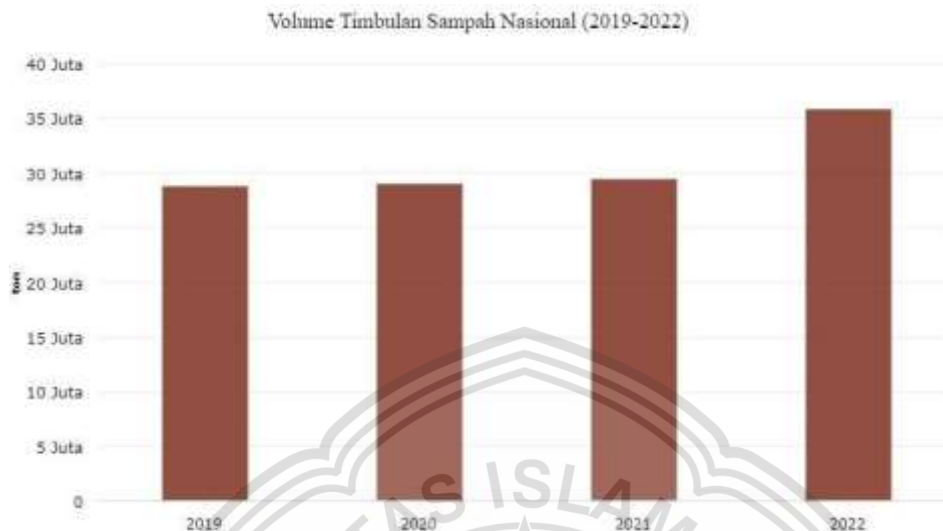
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah menjadi permasalahan kompleks yang terus diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di lingkungan perkotaan maupun daerah kecil di Indonesia. Menurut Kasam (2011:3) sampah adalah hasil sisa yang berasal dari berbagai aktivitas manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan bahkan dapat memberikan dampak negatif akibat jumlahnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila permasalahan sampah dikelola dengan tidak baik dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan meliputi pencemaran tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah yang baik harus melibatkan peran aktif seluruh elemen, mulai dari masyarakat maupun pemerintah, sebab penanganan permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama guna mencegah timbulnya gangguan lingkungan (Gunawan, 2007).

Pengelolaan sampah merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia dan menjadi permasalahan lingkungan yang serius untuk dihadapi oleh masyarakat. Hal ini timbul data sampah nasional disebabkan karena banyaknya hal yang mempengaruhi diantaranya yaitu penduduk banyak mengkonsumsi makanan dan menghasilkan sampah yang banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram jumlah sampah nasional dibawah ini :

Gambar 1. 1 Jumlah dan Presentase Penumpukan Sampah Nasional



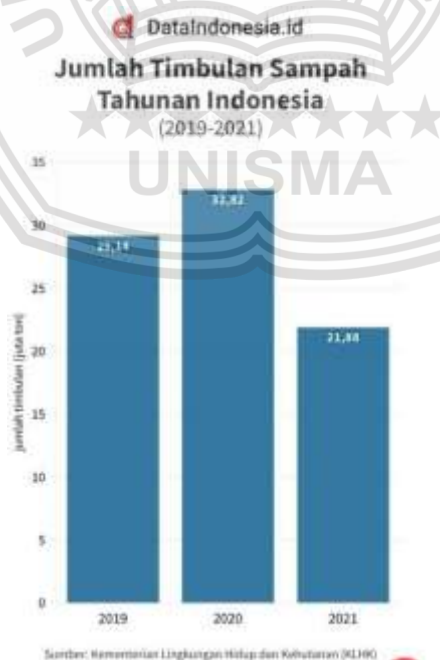
Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Mengacu gambar di atas dapat diketahui bahwasanya produksi sampah di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 sampah Nasional sebesar 28,7 juta ton. Untuk selanjutnya pada tahun 2020 produksi sampah Nasional meningkat menjadi 29,5 juta ton. Hal itu menunjukkan sampah mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2021 sampah naik sebesar 29,44 juta ton. Dan di tahun 2022 permasalahan mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 35,8 juta ton. Sehingga perlu mengurangi dan mendaur ulang kembali limbah sebagai upaya penanganan sampah.

Menurut data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu faktor penyebab tingginya sampah yaitu terus bertambahnya penduduk. Jumlah timbunan sampah di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia.

Penduduk Indonesia berjumlah 278 juta jiwa dan Indonesia menempati nomor 5 dengan jumlah sampah terbesar di Asia Tenggara. Menurut kementerian lingkungan hidup pada tahun 2019 jumlah timbunan sampah di Indonesia sebesar 29,14 juta per ton. Namun, keadaan sampah di Indonesia mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar 32,82 juta per ton. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan negara yang terus menerus meningkat dan menghasilkan banyak limbah sehingga menyebabkan sampah terus meningkat. Untuk tahun selanjutnya, pada tahun 2021 sampah di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 21,88 juta. Jumlah tersebut menurun 33,33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 32,82 juta ton. Maka permasalahan penumpukan sampah di Indonesia bisa dikatakan menurun seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. 2 Gambar Penumpukan Sampah Di Indonesia



Sumber : Data Indonesia, KLHK 2020

Sampah merupakan sisa material dari kegiatan manusia maupun proses alam yang dibuang karena dianggap belum memiliki nilai ekonomis (Hartono, 2008). Dalam perspektif kesehatan lingkungan, istilah *refuse* merujuk pada benda atau unsur yang dipandang tidak bermanfaat, tidak digunakan, tidak diinginkan, atau harus disingkirkan agar tidak mengancam kelangsungan hidup. Sampah dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari padat, cair, hingga gas. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa sampah adalah sisa hasil kegiatan manusia atau alam yang tidak memiliki nilai guna, tidak disenangi, dan perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan. Meskipun demikian, tidak semua sampah dapat dianggap sebagai bahan yang sepenuhnya tidak dapat dimanfaatkan, sebab istilah “belum memiliki nilai ekonomis, tidak dipakai, dan tidak disenangi” mengisyaratkan adanya peluang bagi sampah tersebut untuk diberi nilai guna baru, didaur ulang, atau dimanfaatkan kembali sehingga statusnya dapat berubah menjadi barang yang memiliki nilai. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa padat dari proses alam atau kegiatan sehari-hari manusia.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan memiliki ancaman yang cukup serius terhadap kesehatan, perekonomian maupun lingkungan, aliran polusi dari pembuangan sampah juga berpengaruh terhadap meningkatnya masalah ekonomi dan lingkungan (Radar Malang, 2023). Menurut Ikhsandri (2014:233) Lingkungan alam memiliki kapasitas asimilatif yang terbatas untuk menyerap residu sampah, jadi alam tidak bisa mengurai semua sampah. Sampah mengandung bahan yang berbahaya dengan langsung bisa mempengaruhi fungsi lingkungan

alam yang menjadi penopang utama kehidupan dan perekonomian. Apabila timbunan sampah jumlahnya melebihi kapasitas maka akan menjadi masalah yang menimbulkan ancaman serius bagi keseimbangan lingkungan.

Dalam upaya mengatasi sampah-sampah yang ada dilingkungan, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa tentang pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup upaya pengurangan serta penanganan sampah. Melalui kebijakan ini, diharapkan permasalahan terkait pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat dapat terselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan penumpukan sampah khususnya sampah plastik merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut partisipasi aktif dari pemerintah maupun masyarakat. Beragam langkah dan inovasi telah diupayakan oleh kedua belah pihak untuk menangani persoalan ini. Meski demikian, efektivitas pengelolaan sampah tetap sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran individu dalam membuang serta mengelola sampah secara tepat. Berbagai inisiatif sederhana yang dilakukan masyarakat, seperti kegiatan daur ulang plastik, turut memberikan dampak positif dalam menekan penggunaan plastik dalam keseharian. Meskipun demikian, upaya tersebut dinilai masih belum sebanding dengan besarnya permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi tantangan lingkungan yang cukup kompleks.

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut.

Dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang optimal dan berorientasi lingkungan, sesuai dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal mengatasi persoalan sampah yang ada di Indonesia, pemerintah menjadi tanggung jawab penuh agar bisa mengurangi persoalan yang ada. Salah satu faktor penyebab penumpukan sampah adalah berubahnya pola konsumsi dan gaya hidup dari masyarakat, pola sikap, pola pikir dan pola tindak terhadap tindakan yang dilakukan oleh manusia (Perandlh.go.id 2022).

Di beberapa daerah juga mempunyai peraturan-peraturan sendiri terkait pengelolaan sampah melalui Peraturan Bupati, Walikota dan Pemerintah Daerah salah satunya di Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2019 menetapkan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah lainnya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Saraswati, Suyeno, dan Putra (2023) dalam pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat memberikan dampak negatif serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan kehidupan seperti pencemaran tana dan air.

Pengelolaan sampah melibatkan pemanfaatan berbagai fasilitas dan

infrastruktur yang tersedia, mencakup kegiatan mulai dari penempatan sampah pada wadah yang telah disediakan, proses pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, hingga tahap pengolahan dan pembuangan akhir (Sahil, 2016). Kurangnya perencanaan yang terstruktur dalam pengolahan sampah menyebabkan sistem yang berjalan belum mencapai hasil yang optimal. Selain itu, ketiadaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas dalam penanganan permasalahan sampah tersebut (Nilam, 2016).

Berdasarkan data Badan Statistik (BPS) tahun 2022, dapat dilihat bahwasanya Kabupaten Malang mempunyai luas 3.530,65 km² yang terdiri dari 33 Kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang sebanyak 752 jiwa/km² yang menempati peringkat pertama karena penumpukan sampah yang terus bertambah dari terbanyaknya sampah yang ada. Sampah di Kabupaten Malang kebanyakan merupakan sampah dari hasil pemukiman warga, kantor, pasar tradisional, pusat perniagaan dan kawasan industri (Radar Malang, 2022). Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya Kabupaten Malang paling banyak produksi sampah sebesar 2.005 ton/harinya. Sampah yang ada di Kabupaten Malang kebanyakan merupakan sampah dari hasil pemukiman warga, kantor, pasar tradisional, pusat perniagaan dan kawasan industri. (Radar Malang, 2022).

Gambar 1.3 Gambar Sampah Dikabupaten Malang

Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Malang		
No.	Sumber	Jumlah
1.	Rumah Tangga	772,96 Ton/Hari
2.	Kantor	31,55 Ton/Hari
3.	Pasar Traditional	110,92 Ton/Hari
4.	Pusat Perniagaan	23,31 Ton/Hari
5.	Fasilitas Publik	21,82 Ton/Hari
6.	Kawasan Industri	33,16 Ton/Hari
7.	Lainnya	11,15 Ton/Hari
JUMLAH		1.004,86 Ton/Hari
<i>*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang</i>		

Sumber : Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Malang

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengatur masalah pengelolaan dan penanganan yang harus dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Pada surat keputusan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 19-324-1994 tentang lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimana TPA dilakukan untuk mengembalikan sampah secara aman terhadap lingkungan agar lingkungan tidak kotor dan terus bersih.

Upaya pengurangan sampah memiliki tujuan untuk membangun kesadaran di seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat luas mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara bijak. Kegiatan ini dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah serta pengolahan kembali dengan memanfaatkan metode daur ulang dan penggunaan ulang, atau dikenal dengan konsep *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R). Proses pelaksanaannya dirancang secara cermat, efisien, dan terstruktur, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Dlh.Kab Malang, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemeritah Kabupaten Malang memiliki inovasi terkait dengan pengelolaanya akan tetapi ditemukan masih adanya beberapa kendala dalam

pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaannya, masih terbatas pada sistem 3P pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan (Trihadiningrum dalam Sulisty, 2010: 33). Maka untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di Kabupaten Malang sampah-sampah tersebut dikumpulkan lalu diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada pada setiap desa/kelurahan, setelah itu sampah tersebut diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam hal pengolahan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan langkah yang baik adalah pendauran ulang hasil sampah untuk dijadikan bahan yang lebih berguna dibandingkan di bakar apalagi dibiarkan berserakan di jalanan, sampah yang dibakarpun masih bisa mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan masyarakat apabila polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran sampah terkena angin lalu udaranya tertiuap ke arah pemukiman, tentu hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai langkah yang terbaik untuk menangani timbunan sampah (Kompas, 2020).

Dengan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah, di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang mendirikan Bank Sampah serta binaan di bawahnya. Bank Sampah memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA, tetapi juga memberikan manfaat di sektor ekonomi, pendidikan, pemberdayaan, dan sosial melalui optimalisasi pemanfaatan sampah. Kehadiran Bank Sampah berfungsi sebagai media edukasi bagi masyarakat untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah serta membangun kesadaran bersama dalam pengelolaan sampah yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah secara tidak langsung

membantu menekan volume sampah yang harus ditangani di TPA (Radar Malang.Jawa Pos, 2023).

Pembentukan Bank Sampah berperan sebagai langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah, memproses kembali, serta memanfaatkan sampah, mengingat keberadaan sampah memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan. Jika kebiasaan ini terus dibudayakan, maka berpotensi menjadi bagian dari kebiasaan positif masyarakat Indonesia (Suryani, 2014).

Sebelum adanya Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum memiliki lembaga khusus yang dapat mengelola sampah secara terpadu dari tahap awal hingga akhir secara berkesinambungan. Selama ini, aktivitas pengelolaan sampah hanya berpusat di TPA. Situasi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, meskipun apabila dikelola secara optimal, sampah dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan. Pengelolaan sampah dengan tidak baik dapat menimbulkan beberapa dampak yang serius seperti :

1. Sampah memiliki potensi menjadi sumber penyebaran berbagai penyakit serta menimbulkan kondisi lingkungan yang kumuh dan tidak sehat. Keadaan ini dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme patogen yang membahayakan kesehatan manusia, sekaligus menjadi tempat hidup bagi serangga, tikus, serta hewan liar lainnya.
2. Kegiatan pembakaran sampah berisiko mencemari udara akibat pelepasan zat-zat berbahaya ke lingkungan, yang berdampak negatif

terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, aktivitas ini turut menyumbang pada peningkatan suhu bumi atau fenomena pemanasan global.

3. Pembusukan sampah menghasilkan aroma tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan serta membahayakan kesehatan penduduk sekitar. Cairan limbah yang dihasilkan dari proses ini berpotensi meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah dan sumur, serta apabila mengalir ke badan air, akan menyebabkan pencemaran sungai.
4. Pembuangan sampah secara langsung ke sungai atau badan air lainnya dapat menyebabkan pendangkalan aliran sungai, sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Selain itu, limbah yang dibuang ke perairan akan mencemari lingkungan akuatik dan mengancam keseimbangan ekosistem serta kelangsungan hidup organisme di dalamnya.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan menemukan adanya masalah pada pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang sehingga menyebabkan tidak stabil dikarenakan terdapat 3 zona yaitu zona pasif (area tertutup tanah untuk penghijauan), zona kendali, dan zona aktif untuk proses fermentasi anaerob limbah. Dimana bagian ini merupakan proses pengelolaan limbah. Hal tersebut merupakan sala satu inovasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung, namun ditemukannya masih belum berjalan dengan efektif dikarenakan ada beberapa kendala. Ditemukan bahwasanya sampah-sampah yang berasal dari

rumah tangga seperti popok, sampah plastik, dan sampah lainnya masih banyak yang berserakan yang tidak diolah. Minimnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap permasalahan sampah disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah di saluran air dan di belakang rumah, yang selanjutnya dibakar. Kebiasaan ini menyebabkan jumlah timbunan sampah kian bertambah dari waktu ke waktu. Selain itu, aktivitas pembakaran sampah memberikan dampak buruk terhadap kualitas ekosistem tanah dan lingkungan di sekitar permukiman desa. Penumpukan sampah yang terus terjadi di selokan dan area belakang rumah warga turut memperburuk kondisi lingkungan, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks (Muhlis, memorandum.co.id, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa fokus peneliti terhadap beberapa poin meliputi :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah
2. Masih banyak daerah yang belum mempunyai TPS
3. Kurangnya anggaran yang disediakan
4. Kurangnya pengawasan terhadap tempat yang menjadi pembuangan sampah sembarangan seperti di sungai, jalan raya, dll.

Adanya permasalahan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir maka peneliti perlu melakukan kebijakan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sehingga mampu menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang berorientasi pada pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, mencakup baik tahap implementasi maupun hasil (outcome) serta dampak (impact) yang dihasilkan dari

kebijakan atau program tersebut, baik dalam periode waktu tertentu maupun untuk proyeksi di masa yang akan datang. Menurut Subarsono (2016: 119), evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan menilai kinerja kebijakan. Indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N Dum (2003: 158) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian meliputi :

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talangagung?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talangagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui, menggambarkan serta menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan TPA Wisata Edukasi Talangagung.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talangagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Sebagai bahan dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan menerapkannya di kehidupan nyata.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Sampah di TPA Kabupaten Malang.

2. Manfaat Secara Praktis :

- a. Bagi Universitas Islam Malang, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam kajian literatur bagi mahasiswa.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membuang sampah pada tempatnya dan menjadikannya sebagai penilaian untuk perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang ada di TPA Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang selama enam belas tahun sejak 2009 dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai pada kata maksimal. Hal ini dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan. Adapun juga dalam Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talangagung (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang) ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Efektivitas Pengelolaan Sampah di TPA Wisata Edukasi Talangagung

Ditemukan bahwasannya efektivitas dari evaluasi kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Wisata Edukasi Talangagung yang ditinjau dari kegiatan yang dilaksanakan dan hasil dari kegiatan program, dapat dikatakan kurang efektif dan masih diiringi dengan kerjasama antar tim yang akan dilakukan agar pelayanan dalam pengelolaan sampah bias efektif.

2. Efisiensi Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dari hasil analisis bahwa proses pembiayaan pengelolaan sampah belum efisien dilakukan, dilihat dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran yang cukup besar tetapi belum mampu

mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Malang. Maka kata efisien masih belum mampu dicapai sepenuhnya karena masih terdapat kurangnya fasilitas dan infrastruktur.

3. Kecukupan Pengelolaan Sampah

Ditemukan bahwasannya pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan kecukupan kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah belum cukup mengatasi masalah yang ada, karena masih kurangnya TPS.

4. Perataan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah telah dilakukan secara merata kepada masyarakat sudah mencapai 80% yang telah mendapatkan bantuan gas yang telah dihasilkan dari pengelolaan TPA. Jadi dinilai dari aspek perataan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Malang ini masih belum cukup dikatakan merata. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat tergolong kurang mampu belum mendapatkan bantuan dikarenakan data dari desa yang belum terupdate.

5. Responsivitas Terhadap Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil analisis, bahwasannya respon positif dari masyarakat penerima bantuan merasa sangat puas dan terbantu dengan adanya program gas harapan ini. Bahwa responsivitas dari program ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena bantuan tersebut juga sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Dan terkait dengan respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sudah cukup baik.

6. Ketepatan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Bahwasannya ketepatan program pengelolaan sampah ini sudah tepat karena dalam hal pengangkutan sampah sudah diangkut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari awal.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Malang

Faktor pendukung pengelolaan yang ada di TPA Wisata Edukasi Talangagung yaitu adanya koordinasi rutin, adanya sumber daya unggul, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi dari masyarakat.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Malang yaitu masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sehingga masih banyak terjadi pembuangan sampah sembarangan. Kemudian masih kurangnya informasi mengenai cara pengolahan sampah secara mandiri dilapisi masyarakat dan minimnya jumlah TPS di Kabupaten Malang yang mengakibatkan masih terdapatnya TPS liar yang mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Malang lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah menggunakan program yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatannya sehingga terbangunnya kesadaran dengan sendirinya dimasyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah itu

sendiri.

2. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melakukan penambahan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Malang, agar memudahkan masyarakat yang bermukim jauh dari TPS yang disediakan saat ini, hal tersebut nantinya juga akan mengurangi adanya TPS liar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunawan, Gugun. 2007 *Mengelola Sampah Jadi Uang*. Jakarta Selatan.

Lutfi, A. (2004). *Pencemaran Lingkungan*. Surabaya: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

Moleong. Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta

Jurnal

Cheryke Selsa Adia Novonty, dkk. (2019). *Branding TPA Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang*. 01(1), 64-71.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017), Ed. Ke-5, hlm. 854

Fahmu Rizki, (2022). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah. Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.

Kasam. 2011. *Analisis Lingkungan Pada Tempat Pembuangan Akhir*.

Marliani Novi. (2014). *Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jurnal Formatif 4(2): 124-132

Miya Auliya Agustin (2019), *Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari Sebagai Kawasan Wisata Edukasi*.

<https://eprints.umm.ac.id/43548/3/BAB%20II.pdf>

- Muchammad Zamzami Elamin, dkk. (2018). *Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*. 10(4), 368-375.
- Muhammad Fahrizal Hasibuan, (2021). *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Pustaka Manajemen.
- Ni Wayan Eni Winarsih, dkk. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Nila Sari, Putri. 2016 Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhmampu
- Rezky Putri Amelia Saliding, dkk. (2016). *Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado*. Jurnal.
- Rike Martha Yulia, (2021). *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Sahil J et al. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan DufaDufa Kota Ternate. Jurnal Bioedukasi volume 4 nomor 2. ISSN: 2301-4678/ media.neliti.com.
- Sahil, jailan. 2016 Sistem Pengelolaan Dan Upaya Penanggulangan Sampah
- Saraswati, P. P., Suyeno., dan Putra, L.R (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang. *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 55–65.

Dokumen Resmi Negara

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persampahan KNSP-SPP
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 40, Tahun 2009, tentang Kepemudaan.
- UU No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah

Website

- Website resmi kabupaten malang. <https://kabupatenmalang.go.id>
- Radarmalang.kab.mojokerto, 2022
- Dinas lingkungan hidup kabupaten malang, 2022